

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu Negara dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi Negara tersebut. Salah satu dampak positif dari perkembangan tersebut adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang akan mengurangi pengangguran, namun disisi lain dampak negatif dari perkembangan tersebut adalah pencemaran lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan.

Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk semua pemangku kepentingan. Ketika perusahaan beroperasi, maka proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan memiliki dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun negatif, begitu juga dengan universitas. Semua jenis dampak yang ditimbulkan perusahaan akan memberikan risiko yang mempengaruhi bisnis yang dijalankan oleh aktivitas perusahaan. Perusahaan dalam menetapkan dan menjalankan strategi bisnisnya harus memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan serta berupaya agar dampak yang ditimbulkannya adalah positif.

Hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat non-reciprocal artinya transaksi itu tidak menimbulkan prestasi timbal-balik dari pihak yang berhubungan. Ilmu akuntansi yang mencatat, mengukur, melaporkan externalities ini disebut *Socio Economic Accounting (SEA)*. Istilah lain bisa juga dipakai misalnya *Environmental Accounting*, *Social Responsibility Accounting*, dan lain sebagainya (Sofyan Syafri Harahap,1993:347) dalam (Almilia, 2007).

Akuntansi secara umum yang terjadi adalah pengukuran dan pencatatan terhadap dampak yang timbul dari hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen produk, namun dalam akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroti masalah aspek sosial atau dampak dari kegiatan secara teknis.

Akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran perusahaan yang telah mengambil manfaat dari lingkungan untuk meningkatkan usaha meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan. Dari sudut pandang biaya lingkungan (*environmental cost*) dan manfaat biaya (*cost benefit*) penerapan akuntansi lingkungan akan meningkatkan usaha pengelolaan lingkungan sehingga memungkinkan perusahaan mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan serta memperbaiki kinerja lingkungan dari dampak negatif yang terjadi demi kesinambungan perusahaan itu sendiri (Santoso, 2012).

Perkembangan akuntansi lingkungan sendiri dimulai sekitar pertengahan tahun 1990 dimana *Internasional Accounting Standards Committee* atau *IASC* mengembangkan konsep mengenai akuntansi lingkungan dan audit hak asasi manusia. Setelah itu standar industri mengenai akuntansi lingkungan mulai berkembang dan auditor profesional mulai mengeluarkan prinsip-prinsip tentang audit lingkungan (Astuti, 2014).

Akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan melaporkan akuntansi lingkungan. Bidang ini amat penting sebab khususnya di Indonesia saat ini terlalu banyak perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun swasta yang dalam pelaksanaan operasi usaha

menimbulkan kerusakan ekosistem yang memerlukan biaya penanganan khusus untuk hal tersebut.

Perhatian akan isu lingkungan menjadi sangat penting. Sebab, permasalahan lingkungan saat ini menjadi perhatian baik oleh konsumen maupun investor. Kepedulian kepada lingkungan sebenarnya juga muncul akibat berbagai dorongan dari pihak luar perusahaan antara lain: pemerintah, konsumen, stakeholder dan kompetitor. Untuk menindaklanjuti berbagai dorongan ini, maka perlu pertanggungjawaban perusahaan untuk menciptakan pendekatan secara proaktif dalam meminimalkan dampak lingkungan yang terjadi. Selain itu perusahaan harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan.

Pengungkapan laporan lingkungan dalam *annual report* merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial untuk mengetahui dampak ekologi atas suatu prestasi ekonomi perusahaan. Dan yang terakhir adalah melakukan audit atas laporan yang dibuat perusahaan agar seberapa besar dampak perusahaan terhadap lingkungan tersebut dapat di ukur. Sehingga hasil akhir tindakan proaktif manajemen lingkungan tersebut adalah terciptanya kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik (Musyarofah, 2013).

Pada awalnya pengungkapan akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting Disclosure*) di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih sangat kurang. Banyak penelitian di era *Sosial Accounting Disclosure* umumnya dan *Environmental Accounting Disclosure* pada khususnya memperlihatkan bahwa pihak perusahaan melaporkan kinerja lingkungan yang masih sangat terbatas.

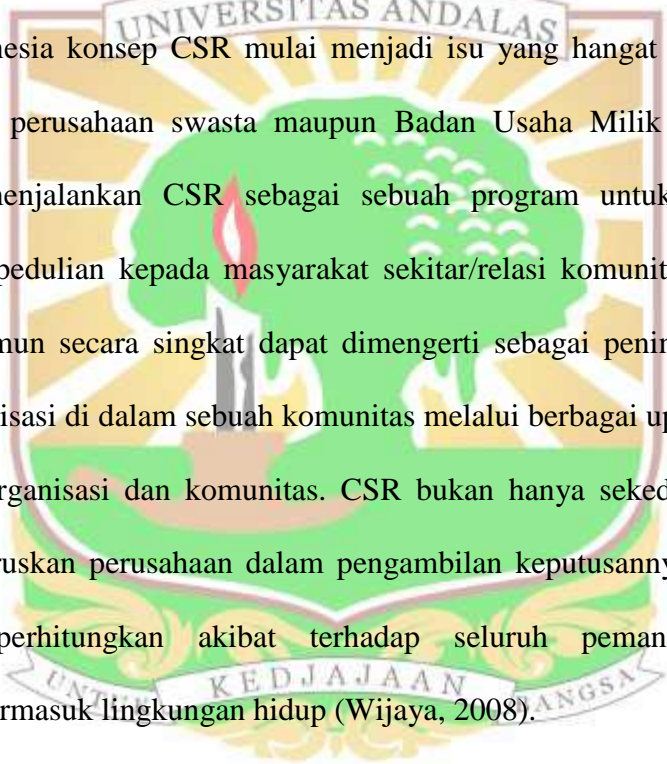
Di Indonesia sendiri, kewajiban pelaporan dampak lingkungan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI hanyalah merupakan pengungkapan yang bersifat nonpublik (khusus terhadap institusi pemerintah terkait). Usaha dari pihak regulasi untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang telah dilakukan dengan menetapkan UU RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Aturan pelaksanaan lebih lanjut telah dinyatakan dengan diterbitkannya PP Nomor 18 Tahun 1999 (Utami, 2008).

Namun seiring berjalannya waktu, implementasi akuntansi lingkungan berbasis *corporate social responsibilities (CSR)* mulai marak diimplementasikan di Indonesia. Banyak perusahaan industri dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental cost*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*).

Perubahan paradigma dan orientasi perusahaan yang memperhatikan semua pihak yang berkepentingan memberikan dampak pada peran tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut *corporate social responsibilities (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu konsep yang mempunyai pengertian bahwa sebuah organisasi perusahaan harus memiliki tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek operasionalnya (Wijaya, 2008).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah kesepakatan dari *World Summit on Sustainable Development (WS-SD)* di Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka

terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Peranan CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan *good corporate governance*, *good corporate citizenship* dan *good business ethics* dari sebuah entitas bisnis. Sehingga perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan *shareholder* (pemilik modal), tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders* (Amba-Rao, 1993; Anderson, Jr., 1989; Kim, 2000; dan Raynard & Forstater, 2002) dalam Mapisangka (2009).



Di Indonesia konsep CSR mulai menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, dimana banyak perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mulai menjalankan CSR sebagai sebuah program untuk memberdayakan masyarakat. Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, namun mengharuskan perusahaan dalam pengambilan keputusannya harus sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk lingkungan hidup (Wijaya, 2008).

Berbagai industri telah dimasukkan dalam penelitian dan studi kasus mengenai *environmental accounting*, tetapi universitas sebagai bagian dari organisasi pelayanan telah gagal menjadi fokus dan perhatian dalam penelitian tersebut. Memang benar bahwa universitas menghasilkan dampak lingkungan yang kurang jelas dibandingkan dengan industri manufaktur, tetapi mereka masih memiliki beberapa dampak

lingkungan yang signifikan, baik langsung dan tidak langsung (Bennett, Hopkins & James 2006) dalam Chang (2007).

Dampak tidak langsung termasuk perubahan perilaku lingkungan melalui peran pendidikan dan penelitian, dampak langsung berhubungan dengan penggunaan kertas dan limbah padat, tetapi hal utama timbul dari kebutuhan untuk menyediakan fasilitas layanan dan manajemen, yang menempatkan permintaan besar pada dua sumber daya lingkungan yaitu implikasi energi dan air. Biaya yang berkaitan dengan konsumsi energi, air, kertas, dan limbah disebut sebagai biaya lingkungan utama pada universitas.

Selain dampak lingkungan langsung dan tidak langsung, universitas dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan fasilitas dan manajemen mereka. Dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasi universitas harus diminimalkan dan biaya lingkungan yang terkait perlu dikelola. *Environmental Accounting* muncul untuk universitas dalam mengurangi dampak lingkungan dan meminimalkan biaya lingkungan.

Peran perguruan tinggi tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Adanya hubungan timbal balik antara perguruan tinggi dan masyarakat membuat keduanya mempunyai peran dalam keberhasilan suatu bangsa. Perguruan tinggi tidak hanya dihadapkan pada tanggungjawab di bidang pendidikan tetapi juga harus memperhatikan tanggungjawab sosial dan tanggungjawab lingkungan (Rahman, 2012).

Pada perguruan tinggi, tanggungjawab sosial perguruan tinggi disebut juga dengan istilah *University Social Responsibilities (USR)*, pada dasarnya merupakan

suatu kebijakan etis yang mempengaruhi kualitas kinerja komunitas perguruan tinggi yang meliputi mahasiswa, pengelola, pengajar dan seluruh karyawan perguruan tinggi melalui manajemen yang bertanggungjawab terhadap dampak pendidikan, kognitif, ketenagakerjaan dan lingkungan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui suatu dialog interaktif dengan masyarakat dalam rangka menghasilkan pembangunan manusia yang berkesinambungan (Sari, 2013).

Implementasi *Coorporate Social Responsibility* merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi juga bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan dan menyelenggaraan tanggung jawab sosial yang disinergikan dengan penerapan Tri Dharma perguruan tinggi, sehingga menjadi satu kesatuan yang terintegrasi terhadap kesejahteraan masyarakat (Rahman, 2012).

Perguruan tinggi di Indonesia sudah mulai bergerak untuk menerapkan *Environmental Accounting* berbasis *Corporate Social Responsibilities (CSR)*, salah satunya adalah Universitas Negeri Semarang yang telah dikukuhkan sebagai Universitas Konservasi yang mengimplementasikan *Green Accounting* berbasis *University Social Responsibilities (USR)*.

Pada universitas yang ada di kota Padang pihak universitas juga sudah mulai menyadari akan pentingnya lingkungan sebagai penunjang pembelajaran. Bentuk kepedulian lingkungan oleh pihak universitas antara lain adalah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, penghijauan di lingkungan kampus, ketersediaan lapangan parkir, kegiatan-kegiatan universitas yang berhubungan dengan lingkungan dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosial universitas di bidang lingkungan, maka universitas akan melakukan beberapa aktifitas yang berhubungan dengan lingkungan. Dengan melakukan aktifitas tersebut, universitas akan membutuhkan biaya yang disebut dengan biaya lingkungan. Adanya akuntabilitas menjadi sangat penting bagi stakeholder maupun pihak manajemen guna mendapatkan informasi mengenai kegiatan apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana laporan mengenai biaya lingkungan tersebut disampaikan.

Sesuai dengan tahapan penerapan *environmental accounting* itu sendiri, apabila suatu universitas sudah melakukan bentuk kepedulian dan keterlibatan terhadap lingkungan, maka langkah selanjutnya universitas dapat membuat laporan kinerja lingkungan dan audit lingkungan dari aktivitas yang telah mereka lakukan. Hal inilah yang menjadi sorotan bagi penulis apakah kepedulian dan keterlibatan lingkungan yang dilakukan oleh universitas di kota Padang telah diiringi dengan pelaporan sebagai bentuk laporan dan kontrol dari pihak intern universitas.

Ada atau tidaknya pelaporan dan audit lingkungan menjadi suatu point penilaian apakah universitas di kota Padang sudah sepenuhnya menerapkan *Environmental Accounting* guna menjaga reputasi universitas atau agar universitas bisa tetap berkelanjutan dan mewujudkan *Good University Governance*.

Atas dasar uraian dan fenomena tersebut diatas, penulis akan menuangkan hasil penelitian kedalam penelitian yang berjudul “Tahapan Implementasi Environmental Accounting pada Universitas di Kota Padang”

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah kepedulian lingkungan (*Environmental Awareness*) pada Universitas yang ada di kota Padang?
2. Bagaimanakah keterlibatan lingkungan (*Environmental Involvement*) pada Universitas yang ada di kota Padang?
3. Bagaimanakah pelaporan lingkungan (*Environmental Reporting*) pada Universitas yang ada di kota Padang?
4. Bagaimanakah audit lingkungan (*Environmental Auditing*) pada Universitas yang ada di kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kepedulian lingkungan (*Environmental Awareness*) pada universitas yang ada di kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan lingkungan (*Environmental Involvement*) pada universitas yang ada di kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana laporan lingkungan (*Environmental Reporting*) pada universitas yang ada di kota Padang.
4. Untuk mengetahui bagaimana audit lingkungan (*Environmental Auditing*) pada universitas yang ada di kota Padang.



1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditujukan kepada :

1. Bagi peneliti, untuk lebih mendalami secara teoritis mengenai implementasi *Environmental Accounting* pada universitas dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan magister akuntansi.
2. Bagi Universitas di Kota Padang, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan untuk melakukan penerapan *Environmental Accounting* agar menjadi *good university governance*.
3. Bagi pembaca/ mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian baru mengenai *Environmental Accounting*.

1.5. Sistematika Penulisan

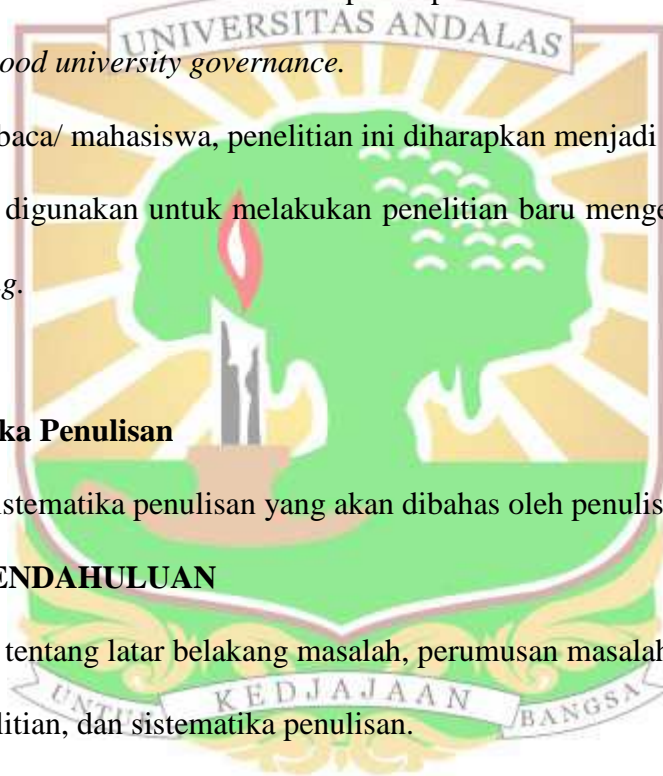
Adapun sistematika penulisan yang akan dibahas oleh penulis meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori mengenai topik yang akan dibahas, termasuk review terhadap penelitian sejenis yang pernah dibuat sebelumnya.



BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan objek penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variable yang diamati, validitas dan reliabilitas serta metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab pembahasan, secara umum akan dibahas mengenai temuan masalah dan analisis terhadap masalah tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran untuk perbaikan terhadap permasalahan yang diteliti.

